



Analisis Tingkat Kemiskinan dan Faktor Yang Memengaruhi di Jawa Timur

Nadya Septian Monica¹, Dwi Susilowati²

^{1,2}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

Email author: nadyamonica04@gmail.com¹, dwi_s@umm.ac.id²

Article Info

Article history:

Received Januari 2, 2025

Revised Februari 17, 2025

Accepted June 28, 2025

Keywords:

Poverty Rate

Open Unemployment Rate

Average Years of Schooling

Population Growth

ABSTRACT

This research examines the impact of the open unemployment rate, average years of schooling, and population growth on poverty levels in districts and municipalities across East Java Province during the 2019-2023 period. By employing panel data regression and a quantitative approach, the study identifies key determinants of poverty and visualizes their geospatial distribution. The findings indicate that the open unemployment rate significantly increases poverty, whereas the average years of schooling significantly reduces it. On the other hand, population growth exhibits a positive but statistically insignificant effect. A simultaneous test confirms that the independent variables collectively influence poverty, contributing 99.03% to its variation. The study underscores the importance of improving access to education, creating employment opportunities, and managing population growth as essential strategies for poverty alleviation. These findings are intended to serve as a foundation for strategic and sustainable poverty reduction policies in East Java.

Corresponding Author:

Dwi Susilowati,

Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang

Email: dwi_s@umm.ac.id



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak tingkat pengangguran terbuka, rata-rata tahun sekolah, dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kotamadya di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2023. Dengan menggunakan regresi data panel dan pendekatan kuantitatif, studi ini mengidentifikasi determinan utama kemiskinan dan memvisualisasikan distribusi geospasialnya. Temuan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka secara signifikan meningkatkan kemiskinan, sedangkan rata-rata tahun sekolah secara signifikan menguranginya. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk menunjukkan efek positif tetapi secara statistik tidak signifikan. Uji simultan menegaskan bahwa variabel independen secara kolektif memengaruhi kemiskinan, berkontribusi 99,03% terhadap variasinya. Studi ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan akses ke pendidikan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengelola pertumbuhan penduduk sebagai strategi penting untuk pengentasan kemiskinan. Temuan ini dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang strategis dan berkelanjutan di Jawa Timur.

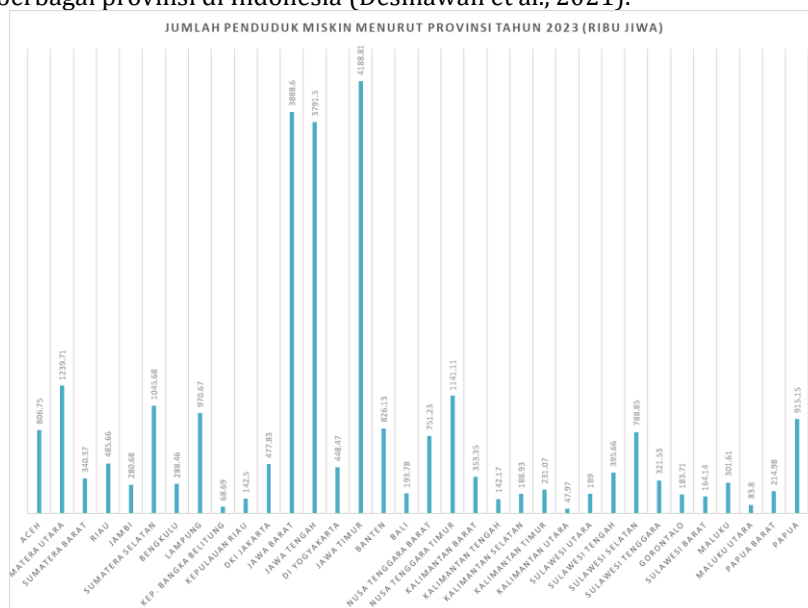
Kata Kunci : Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka Rata-rata Tahun Sekolah Pertumbuhan Penduduk

1. PENDAHULUAN

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kemakmuran bagi semua warga negara, sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi proses pencapaian tujuan ini. Tantangan yang paling signifikan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Indonesia, sebagai negara berkembang, saat ini sedang dalam proses meningkatkan infrastrukturnya untuk mencapai status sebagai negara maju. Sejalan dengan itu, Indonesia dihadapkan pada dinamika makroekonomi, diantaranya kemiskinan, yang mengindikasikan ketimpangan distribusi aset. Di negara-negara yang ekonominya berkembang, sering kali diiringi pertumbuhan penduduk miskin (Iqbal Salsabil & Westi Rianti, 2023). Beragam gagasan dan konsep telah dipelajari serta diterapkan untuk mengatasinya, namun hasil yang diperoleh belum memadai. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, masih menghadapi persoalan kemiskinan hingga saat ini (Wulandari & Nugraha Pratama, 2022).

Kemiskinan merupakan isu sosial berskala global yang dialami oleh semua negara di dunia, tanpa terkecuali. Tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dari tantangan ini. Sebagai masalah kemanusiaan, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Secara umum, kemiskinan menggambarkan keadaan penderitaan dan ketidakmampuan individu, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan maupun akibat minimnya perlindungan sosial yang diberikan oleh negara atau masyarakat kepada mereka (Azriyansyah, 2022; Didu & Fauzi, 2016).

Masalah kemiskinan sebagai isu utama di negara-negara sedang berkembang, karena untuk menunjukkan belum optimal dalam pencapaian kesejahteraan. Demikian juga kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu permasalahan paling signifikan dan dominan yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini. Berbagai kebijakan dan program yang dirancang Pemerintah difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia (Desmawan et al., 2021).



Gambar 1 Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Jawa Timur (4.188,81 ribu jiwa), diikuti oleh Jawa Barat (3.886,6 ribu jiwa) dan Jawa Tengah (3.791,5 ribu jiwa). Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah DKI Jakarta (498,69 ribu jiwa), Kepulauan Bangka Belitung (88,69 ribu jiwa), dan Maluku Utara (83,8 ribu jiwa). Data ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan dalam jumlah penduduk miskin antarprovinsi, dengan konsentrasi kemiskinan yang besar di wilayah-wilayah berpenduduk padat

seperti Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dan terfokus untuk mengatasi kemiskinan di provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi.

Salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Menurut Sukirno (2004), pengangguran memiliki dampak negatif berupa penurunan penghasilan, yang berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan individu. Penurunan kesejahteraan akibat pengangguran ini meningkatkan risiko seseorang terjebak dalam kemiskinan (Pradipta & Dewi, 2020). Pengangguran menjadi salah satu persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut definisi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik, pengangguran mengacu pada individu berusia dalam rentang angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. Jika masalah pengangguran tidak segera diatasi, hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan angka kriminalitas dan kemiskinan di suatu wilayah atau negara (Berliani, 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, seperti, rendahnya tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan tingginya tingkat pengangguran. Yang semuanya merupakan faktor sumber daya manusia. Sumberdaya manusia yang rendah yang berarti tidak berkualitas sebagai penyebab utamanya tingginya kemiskinan.

Pendidikan adalah kebutuhan utama bagi setiap individu, karena masyarakat yang memiliki pendidikan mampu melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Tingkat pendidikan sering dijadikan tolok ukur untuk menilai kesejahteraan suatu populasi, di mana kualitas sumber daya manusia meningkat seiring dengan tingginya pendidikan yang dimiliki. Dengan memberikan akses pada ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendidikan berperan krusial dalam membantu seseorang mengatasi kemiskinan (Suryawati, 2015). Penelitian ini mengevaluasi kualitas pendidikan dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah, yang merefleksikan tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh masyarakat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya berbanding lurus dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada akhirnya dapat mendongkrak produktivitas. Baik pendidikan formal maupun nonformal memiliki kontribusi penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Kontribusi ini dapat bersifat tidak langsung, melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja, maupun langsung, melalui program pelatihan yang dirancang untuk kelompok masyarakat miskin agar memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka (Hasanah et al., 2021).

Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan, selain rendahnya tingkat pendidikan, adalah tingginya jumlah penduduk. Dalam upaya pembangunan ekonomi suatu daerah, jumlah penduduk sering kali menjadi tantangan mendasar. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan (Andhykha et al., 2018). Selain itu, kemiskinan juga dapat muncul akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang menghasilkan kelompok penduduk miskin baru (Ritonga & Wulantika, 2020).

Berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dengan menggunakan variabel seperti tingkat pengangguran, pendidikan, dan jumlah penduduk. Namun, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan pola distribusi kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu, tingkat kemiskinan di Jawa Timur diketahui lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 berikut.

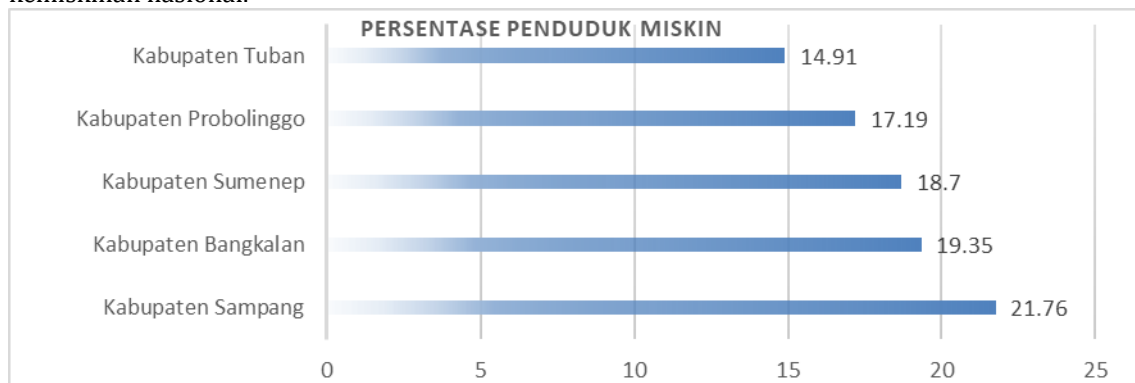
Tabel 1 Tingkat Kemiskinan Jawa Timur dan Nasional 2015-2023

Tahun	Jawa Timur	Nasional
2015	12.26	11.13
2016	11.85	10.70
2017	11.20	10.12
2018	10.85	9.66
2019	10.20	9.20
2020	11.46	10.19
2021	10.59	9.71
2022	10.49	9.57
2023	10.35	9.36

Sumber: Bappeda Prov. Jatim, 2024

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional selama periode 2015 hingga 2023. Data mengenai laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Jawa Timur serta secara nasional menunjukkan hal yang menarik: laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tingkat nasional disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Jika dibandingkan, laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur lebih tinggi daripada rata-rata nasional, namun tingkat kemiskinannya juga tetap lebih tinggi. Fenomena ini tentu menjadi topik menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Di Provinsi Jawa Timur, dari total 38 Kabupaten/Kota, sebanyak 17 di antaranya memiliki tingkat kemiskinan yang melampaui rata-rata provinsi, sedangkan 21 Kabupaten/Kota lainnya berada di bawah rata-rata tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 44,74 persen wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional.



Gambar 2 Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Jawa Timur (per Maret 2023)

Sumber: Bappeda Prov. Jatim, 2022

Dari gambar 2 tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur ada di Sampang, Bangkalan dan Sumenep. Tiga wilayah ini masuk dalam wilayah pulau Madura. Sebaliknya untuk jumlah penduduk miskin paling banyak ada di Kabupaten Malang, Jember dan Sampang. Kabupaten Sampang dan Sumenep merupakan kabupaten yang menarik karena disamping tingkat kemiskinannya yang tinggi jumlah penduduk miskinnya juga tinggi.



Gambar 3 Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi di Jawa Timur (2023)

Sumber: Bappedapro. Jatim, 2022

Dengan kondisi tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Timur yaitu diatas angka nasional, maka Pemerintah daerah Jawa Timur membuat program untuk mengatasi kemiskinan yaitu kebijakan *Anti Poverty Program* atau di singkat dengan APP. Tujuan dari Program Anti Kemiskinan (APP) adalah untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka melalui pemberdayaan usaha kelompok-kelompok miskin, dengan menerapkan pendekatan kemitraan yang berbasis klaster.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini akan menghadirkan analisis komprehensif tentang hubungan antara faktor-faktor utama penyebab kemiskinan (pengangguran, pendidikan, dan jumlah penduduk) dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian ini juga akan memanfaatkan pendekatan kuantitatif dan analisis geospasial untuk memetakan persebaran kemiskinan secara visual dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran berdasarkan karakteristik geografis dan demografis setiap provinsi.

2. LANDASAN TEORI

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang/sekelompok orang tidak mampu atau menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan tersebut mencakup kesehatan, pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan, pendidikan, pendapatan yang memadai, pekerjaan, serta kualitas hidup yang layak. Karena itu, memiliki pekerjaan menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Fajriansyah & Chandriyanti, 2022). Kemiskinan mencerminkan keadaan kekurangan dalam berbagai hal, seperti minimnya modal, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, penghasilan yang sedikit, lemahnya daya beli masyarakat yang kurang mampu, serta terbatasnya peluang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Azriyansyah, 2022).

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merujuk pada situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan namun belum berhasil memperolehnya. Di sisi lain, tenaga kerja mencakup individu dalam rentang usia kerja, yaitu mereka yang berusia lima belas tahun ke atas, yang memiliki kapasitas untuk memproduksi barang atau jasa (Utami et al., 2022). Menurut Sukirno (2004), pengangguran adalah jumlah individu dalam angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya (Hilmi et al., 2022).

Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator utama dalam mengukur tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah, yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia serta pencapaian pembangunan di suatu daerah. RLS merujuk pada jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk mengikuti pendidikan formal. Dalam kondisi normal, diharapkan RLS di suatu daerah tidak akan menurun. Penghitungan RLS melibatkan penduduk yang berusia 25 tahun ke atas (Valiant Kevin et al., 2022). Teori modal manusia (Becker, 1964) menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, sehingga berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Pendidikan lebih tinggi memperbesar peluang kerja dan pendapatan.

Pertumbuhan Penduduk

Perubahan populasi dari waktu ke waktu dapat dihitung sebagai selisih jumlah individu dalam suatu populasi, yang diukur berdasarkan per satuan waktu. Teori Malthusian (1978) menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dapat menjadi faktor yang mendorong maupun menghambat pembangunan. Hal ini terjadi karena penambahan penduduk dapat memperluas jumlah tenaga kerja sekaligus memperbesar pasar. Ukuran pasar barang dan jasa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Dalam ekonomi daerah, jumlah penduduk menjadi isu yang sangat penting, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dapat menghalangi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan (Salsabil & Rianti, 2023).

3. METODE PENELITIAN

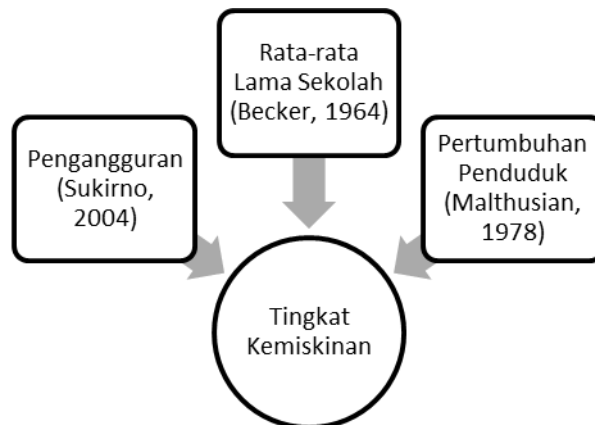
Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif, di mana data yang digunakan berbentuk angka dan dianalisis dengan pendekatan statistik (Ninit, 2018). Penelitian ini memanfaatkan data panel yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*, dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, sementara tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan penduduk berfungsi sebagai variabel independen. Data tersebut diperoleh dari BPS Provinsi Jawa

Timur. Subjek dalam penelitian ini mencakup 34 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2019 hingga 2023.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi atau studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang terpercaya. Dokumentasi merujuk pada penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap arsip atau dokumen yang menjadi sumber data. Analisis terhadap dokumen bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji dokumen resmi, seperti kebijakan, peraturan, hasil penelitian, dan materi lainnya, dengan memastikan validitas serta keabsahan informasi yang diperoleh (Amruddin et al., 2022).

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

NO	VARIABEL	DEFINISI	SATUAN
1	Tingkat Kemiskinan	Perbandingan antara jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional/regional dengan total populasi pada suatu periode tertentu.	Persen
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan membagi jumlah pengangguran oleh total angkatan kerja, lalu mengalikan hasilnya dengan 100 (Gheorghe & Roman, 2024).	Persen
3	Rata-rata lama sekolah	Lama waktu yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal.	Tahun
4	Pertumbuhan penduduk	Perubahan populasi dari waktu ke waktu dapat dihitung sebagai selisih jumlah individu dalam suatu populasi, yang diukur berdasarkan "per satuan waktu" (Fajriansyah & Chandriyanti, 2022)	Persen



Gambar 4 Kerangka Analisis

Pemodelan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui regresi data panel. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi Eviews 13 dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membuat Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), 2) Menentukan model terbaik di antara ketiga model tersebut, dan 3) Menafsirkan model akhir berdasarkan kerangka analisis yang ditampilkan pada Gambar 4. (Lasdiyanti et al., 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam regresi data panel, dilakukan uji pemilihan model terbaik yang terdiri dari uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM. Ketiga uji ini digunakan untuk memilih model terbaik antara CEM, FEM, dan REM.

Tabel 3 Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik

NO	NAMA UJI	PROBABILITAS	KEPUTUSAN
1	UJI-CHOW	0,000	MEMILIH FEM
2	UJI-HAUSMAN	0,000	MEMILIH FEM

Sumber: Hasil olah data

Hasil dari Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan probabilitas (p-value) yang sangat kecil, yaitu 0,0000, untuk kedua uji tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kita menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa model Random Effects Model (REM) lebih tepat dibandingkan dengan Fixed Effects Model (FEM). Dengan demikian, baik Uji Chow maupun Uji Hausman secara konsisten memutuskan untuk memilih FEM sebagai model yang lebih sesuai untuk analisis data panel ini. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan FEM memberikan keyakinan bahwa estimasi parameter yang dihasilkan akan lebih akurat dan relevan. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 4 Hasil Estimasi Model FEM

VARIABEL	KOEFISIEN	PROBABILITAS	KETERANGAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	0.210714	0.0000	Positif Signifikan
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	-0.561043	0.0005	Negatif Signifikan
PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	0.036374	0.0559	Positif Tidak Signifikan
UJI F (SIMULTAN)		0.000000	Signifikan
R-SQUARE		0.990386	Kontribusi pengaruh sebesar 99,03% terhadap Y

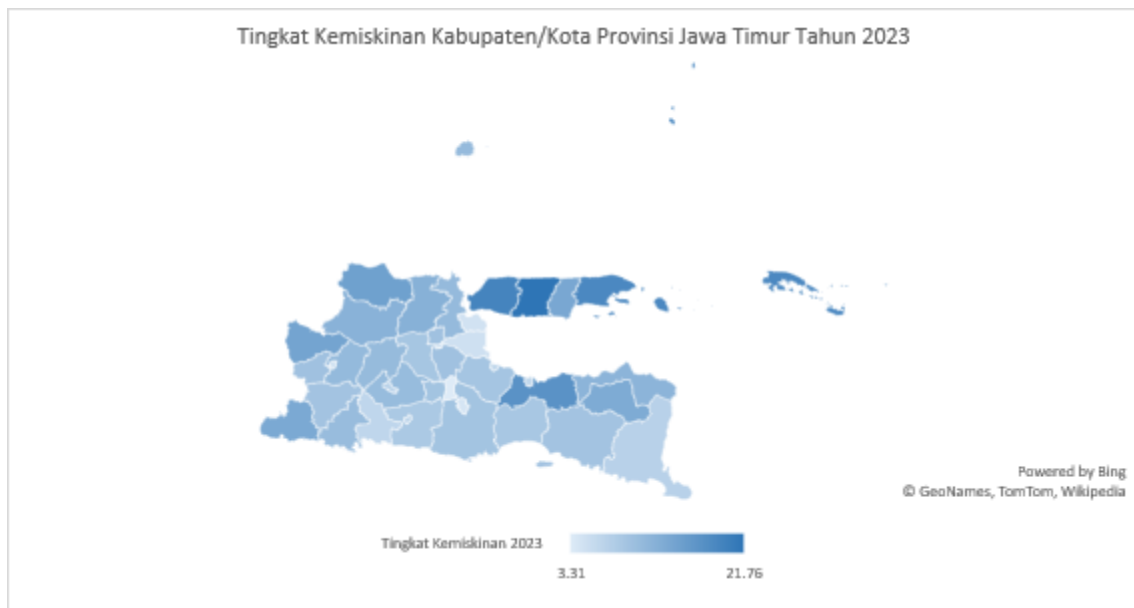
VARIABEL Y= TINGKAT KEMISKINAN

Sumber: Hasil olah data, 2024

Hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh beberapa variabel terhadap tingkat kemiskinan (Y). Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien positif sebesar 0.210714 dengan p-value 0.0000, yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran terbuka berhubungan positif dan signifikan dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah memiliki koefisien negatif sebesar -0.561043 dan p-value 0.0005, menunjukkan bahwa peningkatan lama pendidikan berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Sementara itu, variabel pertumbuhan penduduk menunjukkan koefisien positif sebesar 0.036374 dengan p-value 0.0559, yang berarti meskipun ada kecenderungan positif terhadap kemiskinan, pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat kepercayaan yang umum digunakan ($\alpha = 0.05$). Uji F menghasilkan p-value sebesar 0.000000, yang menunjukkan bahwa secara bersamaan, seluruh variabel independen memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Di samping itu, nilai R-squared yang mencapai 0.990386 menunjukkan bahwa sekitar 99,03% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model ini, yang menggambarkan kekuatan model yang sangat baik untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Pembahasan

- Tingkat Kemiskinan



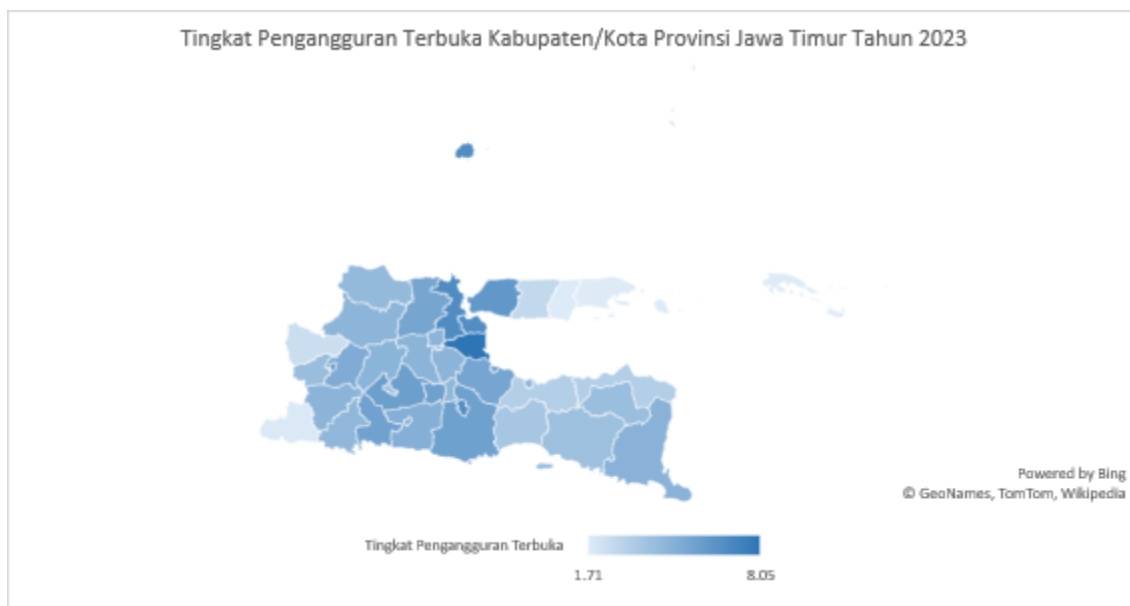
Gambar 5 Grafik Peta Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Data tingkat kemiskinan di wilayah Jawa Timur menunjukkan variasi yang signifikan antara kabupaten/kota. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Sampang (21.76%), diikuti oleh Bangkalan (19.35%) dan Sumenep (18.7%), yang semuanya berada di Pulau Madura. Di sisi lain, tingkat kemiskinan terendah terdapat di Kota Batu (3.31%), Kota Malang (4.26%), dan Kota Surabaya (4.65%). Tren ini mencerminkan disparitas ekonomi yang tajam antara wilayah kota besar dan wilayah lain, di mana daerah perkotaan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah berkat akses yang lebih baik ke peluang ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa daerah kota/kabupaten terpencil di Jawa Timur masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kemiskinan, terutama di wilayah Madura dan beberapa kabupaten di bagian timur. Sementara itu, kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang mencatat tingkat kemiskinan yang rendah, mengindikasikan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dan distribusi sumber daya. Untuk mengurangi kesenjangan ini, diperlukan strategi yang terintegrasi, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja, investasi dalam infrastruktur pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi (Qurratu'ain & Ratnasari, 2016).

- Tingkat Pengangguran terbuka



Gambar 6 Grafik Peta Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur 2023

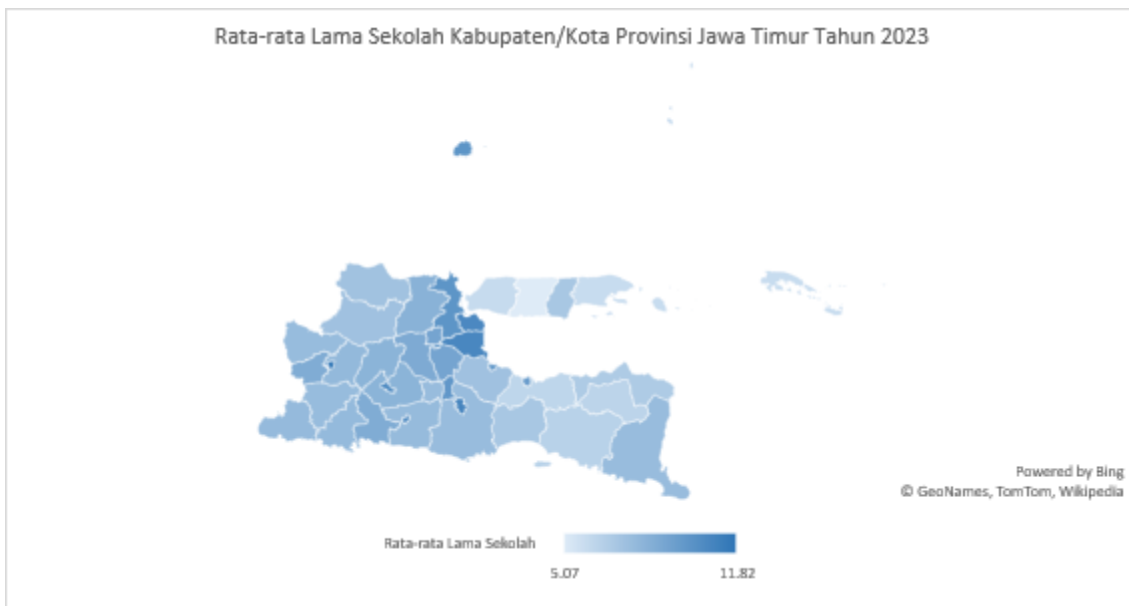
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur 2023 menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah. TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Sidoarjo (8,05%) dan Kota Malang (6,8%), mencerminkan tantangan dalam persaingan kerja di wilayah perkotaan dan kawasan industri. Sebaliknya, daerah seperti Sumenep (1,71%), Pamekasan (1,74%), dan Pacitan (1,83%) memiliki TPT terendah, yang kemungkinan mencerminkan dominasi pekerjaan di sektor informal atau berbasis pertanian. Tingginya TPT di daerah urban dapat dihubungkan dengan tuntutan kualifikasi kerja yang lebih tinggi dan ketersediaan pekerjaan yang terbatas dibandingkan dengan populasi usia kerja. Sementara itu, rendahnya TPT di daerah pedesaan tidak selalu mencerminkan kesejahteraan ekonomi, karena sebagian besar penduduknya mungkin terlibat dalam pekerjaan subsisten atau berpenghasilan rendah. Data ini menyoroti kebutuhan akan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis kebutuhan lokal untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Data tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur 2023 menunjukkan keterkaitan yang signifikan antara kedua indikator ini. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, seperti Sampang (21,76%), Bangkalan (19,35%), dan Sumenep (18,7%), justru mencatat TPT yang relatif rendah (masing-masing 2,72%, 6,18%, dan 1,71%). Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di daerah-daerah tersebut lebih dipengaruhi oleh kualitas pekerjaan yang tersedia—seperti sektor informal dengan pendapatan rendah—daripada oleh tingginya pengangguran. Sebaliknya, kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan rendah, seperti Kota Batu (3,31%) dan Kota Malang (4,26%), cenderung memiliki TPT yang lebih tinggi, masing-masing 4,52% dan 6,8%, yang menunjukkan adanya dinamika urban seperti persaingan kerja atau kebutuhan keterampilan yang lebih tinggi.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis lokal untuk mengatasi kemiskinan. Daerah dengan TPT tinggi, seperti Sidoarjo (8,05%) dan Kota Surabaya (6,76%), membutuhkan strategi peningkatan keterampilan kerja dan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Di sisi lain, wilayah pedesaan dengan TPT rendah tetapi tingkat kemiskinan tinggi memerlukan fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian serta infrastruktur ekonomi lokal. Dengan demikian, solusi yang terintegrasi dapat mempersempit kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Jawa Timur (Wahyudi, 2018).

- Rata-rata Lama Sekolah



Gambar 7 Grafik Peta Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur 2023

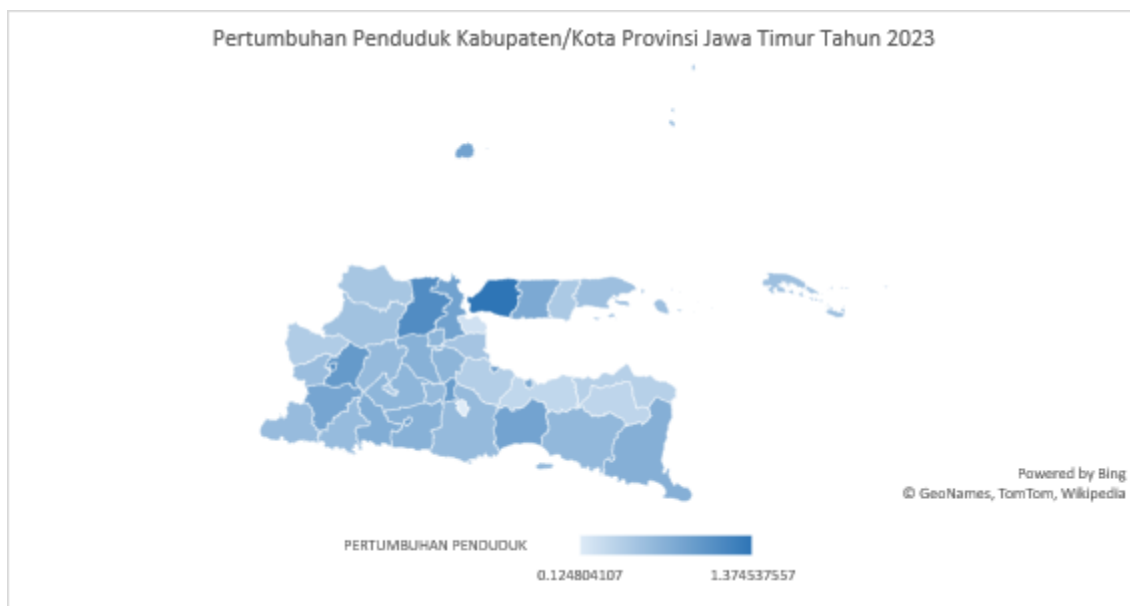
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Data RLS di Jawa Timur 2023 mencerminkan kesenjangan dalam akses dan capaian pendidikan di berbagai wilayah. Kota Madiun memiliki RLS tertinggi (11.82 tahun), diikuti oleh Kota Mojokerto (11.05 tahun) dan Kota Malang (10.94 tahun), yang menunjukkan keberhasilan kota-kota ini dalam memberikan akses pendidikan formal hingga tingkat menengah atas. Sebaliknya, kabupaten seperti Sampang (5.07 tahun), Bangkalan (5.99 tahun), dan Sumenep (5.94 tahun) mencatat RLS terendah, menandakan keterbatasan dalam akses pendidikan, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan geografis. Data ini juga menegaskan bahwa wilayah perkotaan cenderung memiliki RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil. Untuk meningkatkan RLS di daerah dengan capaian rendah, diperlukan intervensi berupa peningkatan fasilitas pendidikan, dukungan beasiswa, serta kampanye pentingnya pendidikan kepada masyarakat lokal.

Data RLS di Jawa Timur 2023 menunjukkan kesenjangan pendidikan yang signifikan antar wilayah. Kota-kota seperti Madiun (11.82 tahun), Mojokerto (11.05 tahun), dan Malang (10.94 tahun) memiliki RLS yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten seperti Sampang (5.07 tahun), Bangkalan (5.99 tahun), dan Sumenep (5.94 tahun). Hal ini mencerminkan perbedaan tajam dalam akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah Madura yang memiliki tantangan geografis dan ekonomi. Daerah dengan RLS tinggi umumnya menunjukkan pembangunan pendidikan yang lebih baik, sementara daerah dengan RLS rendah menghadapi keterbatasan infrastruktur dan hambatan sosial-ekonomi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat.

Ketika dikaitkan dengan data tingkat kemiskinan, terlihat hubungan erat antara pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Kabupaten seperti Sampang, Bangkalan, dan Sumenep tidak hanya memiliki RLS yang rendah tetapi juga mencatat tingkat kemiskinan yang tinggi (masing-masing 21.76%, 19.35%, dan 18.7%). Sebaliknya, kota-kota dengan RLS tinggi, seperti Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Malang, memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah (masing-masing 4.74%, 5.77%, dan 4.26%). Hal ini membuktikan bahwa investasi dalam pendidikan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peluang kerja yang lebih baik. Upaya peningkatan RLS di wilayah dengan kemiskinan tinggi perlu menjadi prioritas, dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan, program beasiswa, dan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai untuk memutus rantai kemiskinan (Rizal, 2015).

- Pertumbuhan Penduduk



Gambar 8 Grafik Peta Pertumbuhan Penduduk di Jawa Timur 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Data pertumbuhan penduduk di Jawa Timur 2023 menunjukkan variasi yang cukup besar antar kabupaten dan kota. Kabupaten Bangkalan mencatat pertumbuhan penduduk tertinggi (1.37%), diikuti oleh Kabupaten Lamongan (1.13%) dan Kota Madiun (1.14%), sementara Kota Malang (0.12%), Kota Surabaya (0.22%), dan Kabupaten Probolinggo (0.33%) mencatat pertumbuhan terendah. Tingginya pertumbuhan penduduk di daerah seperti Bangkalan dan Lamongan, yang juga memiliki tingkat kemiskinan tinggi, menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi dapat menjadi tantangan jika tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, dan akses pendidikan yang memadai. Sebaliknya, rendahnya pertumbuhan di kota besar seperti Malang dan Surabaya mencerminkan urbanisasi yang cenderung terkendali dan mungkin disertai dengan keberhasilan dalam pengendalian populasi.

Ketika dikaitkan dengan data tingkat kemiskinan, terlihat bahwa daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bangkalan (1.37%) juga mencatat tingkat kemiskinan yang tinggi (19.35%). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah dengan kemiskinan tinggi dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama jika sumber daya tidak cukup untuk mengimbangi kebutuhan populasi yang meningkat. Sebaliknya, daerah dengan pertumbuhan rendah seperti Kota Malang dan Surabaya, yang juga memiliki tingkat kemiskinan rendah, menunjukkan bahwa pengelolaan penduduk yang lebih stabil dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian populasi dan peningkatan kesejahteraan di wilayah dengan pertumbuhan tinggi perlu menjadi prioritas untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat (Wardhana et al., 2023).

- Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien sebesar 0,210714 dan p-value sebesar 0,0000. Ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% dalam tingkat pengangguran terbuka akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,210714 unit. Secara statistik, hubungan ini sangat kuat, yang berarti tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu faktor utama yang memicu kenaikan kemiskinan. Meningkatnya pengangguran menyebabkan lebih banyak individu kehilangan sumber pendapatan, yang menurunkan daya beli rumah tangga, dan pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.

Fenomena ini menegaskan pentingnya upaya penurunan tingkat pengangguran sebagai langkah strategis dalam mengurangi kemiskinan. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong sektor ekonomi produktif yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam memperluas peluang kerja juga sangat penting. Dengan menurunkan tingkat pengangguran, tidak hanya akan terjadi perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pengurangan dampak

lanjutan terhadap masalah sosial yang berkaitan dengan kemiskinan (Kesumadewi & Aprilyani, 2024; Lubis et al., 2024). Hasil ini searah dengan penelitian oleh C. Sembiring Dkk (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran memiliki dampak positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat (Sembiring et al., 2023).

Berdasarkan hasil analisis regresi, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dengan tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar -0.561043 dan nilai probabilitas (p-value) 0.0005. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu tahun dalam rata-rata lama sekolah dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebanyak 0.561043 unit. Secara statistik, hubungan ini terbilang signifikan, yang mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki peran yang penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, individu lebih berpeluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan bergaji lebih tinggi, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka serta mengurangi kemungkinan terjerumus ke dalam kemiskinan.

Hasil ini menunjukkan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan sebagai strategi untuk mengatasi kemiskinan. Program-program seperti pemberian beasiswa, subsidi pendidikan, dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah terpencil dapat membantu mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah. Selain itu, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, termasuk pelatihan keterampilan teknis dan vokasi, dapat memperkuat daya saing tenaga kerja dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Dengan investasi yang tepat di sektor pendidikan, pengurangan tingkat kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan (Aidhi et al., 2023; Puri & Wicaksono, 2023; Saraswati et al., 2022). Hasil ini sejalan dengan penelitian M.N. Faritz (2020) yang menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (Faritz & Soejoto, 2020).

Berdasarkan hasil regresi, pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar 0.036374 dan probabilitas (p-value) 0.0559. Artinya, setiap peningkatan 1% dalam tingkat pertumbuhan penduduk berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.036374 unit. Namun, pengaruh ini tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan positif, pertumbuhan penduduk bukanlah faktor utama yang secara langsung memengaruhi tingkat kemiskinan dalam model ini.

Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk yang tinggi tetap dapat memberikan tekanan pada berbagai aspek, seperti ketersediaan lapangan kerja, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta sumber daya alam yang terbatas. Penting bagi pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk dengan kebijakan kependudukan yang efektif, seperti program keluarga berencana dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengendalian jumlah penduduk. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat berkontribusi pada pengurangan dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan. Dengan pengelolaan yang tepat, dampak dari pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan bisa dikendalikan atau bahkan diubah menjadi kesempatan ekonomi (Jalaludin & Suriadi, 2021; Setiawan, 2019). Hasil ini tidak searah dengan penelitian oleh F. fathurohman Dkk (2022) yang menyebutkan bahwa jumlah Penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Fathurohman et al., 2022).

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif yang signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran cenderung menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah memberikan dampak negatif yang signifikan, yang berarti bahwa peningkatan kualitas pendidikan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan penduduk menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan. Dengan nilai R-squared sebesar 99,03%, model ini mampu menggambarkan sebagian besar variasi dalam tingkat kemiskinan.

Sebagai langkah strategis, pemerintah disarankan untuk fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas guna menekan angka pengangguran. Selain itu, perluasan akses pendidikan melalui penguatan infrastruktur sekolah, pemberian subsidi, dan program pelatihan kerja harus menjadi prioritas. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti melalui program keluarga berencana,

juga penting untuk mengurangi tekanan pada sumber daya dan layanan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut sebaiknya dipadukan dengan pengembangan ekonomi lokal di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar analisis mencakup variabel tambahan seperti akses layanan kesehatan, investasi infrastruktur, dan pola konsumsi masyarakat untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan untuk mendalami faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kemiskinan di berbagai wilayah di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidhi, A. Al, Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., Palembang, S. P., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118-134. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i02.229>
- Amruddin, Muskananfolo, I. L., Febriyanti, E., Bad'ah, A., Pandie, F. R., Goa, M. Y., & Martinin, Y. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Sumber Elektronik)*. CV Media Sains Indonesia.
- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2). <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Azriyansyah, Z. (2022). Analisis Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 225-238. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i3.308>
- Berliani, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 872. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2244>
- Desmawan, D., Syaifudin, R., Mamola, R. M., Haya, H., & Indriyani, D. (2021). Determinant Factors Poverty of Relativity in Banten Province: A Panel Data Analysis. *Ecoplan*, 4(2), 131-141. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.387>
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN LEBAK. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Fajriansyah, S., & Chandriyanti, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 558. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6957>
- Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1), 15-21. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21>
- Fathurohman, F., Fitriana, D., Baharta, R., & Mukminah, N. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan. *Journal of Public Power*, 6(2), 104-112. <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6105>
- Gheorghe, M., & Roman, A. (2024). The unemployment rate and the future of the employment market in Romania The impact of inflation A study on the Romanian post-pandemic economy dominated by uncertainty. *Theoretical & Applied Economics*, 31(1).
- Hasanah, R., Syaparuddin, S., & Rosmeli, R. (2021). Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 223-232. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16253>
- Hilmi, Marumu, M. N. H. D., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 19-26. <https://e-journal.unimaju.ac.id/index.php/GJIEP/article/view/14>
- Iqbal Salsabil, & Westi Rianti. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 - 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15-24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>

- Jalaludin, & Suriadi, I. (2021). Mobilitas dan Persebaran Penduduk NTB (Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan). *Journal of Economics and Business*, 7(2), 213–222. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i2.77>
- Kesumadewi, E., & Aprilyani, A. (2024). Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–15. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.360>
- Lasdiyanti, M., Kencana, E. N., & Suciptawati, P. (2019). Modeling Human Development Index of Bali with Spatial Panel Data Regression. *European Journal of Engineering and Technology Research*, 4(5), 132–137. <https://doi.org/10.24018/ejeng.2019.4.5.1312>
- Lubis, R., Putra, J. E., Widayati, T., Ladjin, N., & Al Fajar, A. H. (2024). Peran dan Strategi UMKM dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(8). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.4611>
- Ninit, A. (2018). Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Pradipta, S. A., & Dewi, R. M. (2020). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 109–115. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p109-115>
- Puri, I. A. W. R. I., & Wicaksono, P. (2023). Pendidikan Vokasi dan Pengembalian Upah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 129–139. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.56689>
- Qurratu'ain, A. Q., & Ratnasari, V. (2016). Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v5i2.16582>
- Ritonga, M., & Wulantika, T. (2020). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018). *Jurnal Diversita*, 6(1), 95–102. <https://doi.org/diversita.v6i1.3135>
- Rizal, R. N. (2015). Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(1), 15–30. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i1.596>
- Salsabil, I., & Rianti, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>
- Saraswati, B. D., Krisnawati, Y. D., & Adhitya, D. (2022). DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA 34 PROVINSI DI INDONESIA: PENDEKATAN FIXED EFFECT MODEL. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1139–1156. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2218>
- Sembiring, C., Masinambow, V. A. J., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 25–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/45324>
- Setiawan, S. A. (2019). MENGOPTIMALKAN BONUS DEMOGRAFI UNTUK MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2). <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.34>
- Suryawati, C. (2015). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03), 122. <https://doi.org/10.22146/jmpk.v8i03.2927>
- Utami, N. D., Nurfalah, R., & Desmawan, D. (2022). Analisis Adanya Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 162–175. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i3.74>
- Valiant Kevin, A., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). PENGARUH PDRB, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN RATA RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2959–2968. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>
- Wahyudi, K. D. (2018). KEBIJAKAN STRATEGIS USAHA PERTANIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Majalah Ilmiah DIAN ILMU*, 11(2). <https://doi.org/10.37849/midi.v11i2.15>

- Wardhana, A., Kharisma, B., Adam, A. M., & Fahd, M. D. (2023). The Role Of Local Governments On Increasing Welfare And Reducing Poverty In The District/City Of West Java. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 187. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2023.v16.i02.p01>
- Wulandari, I., & Nugraha Pratama, A. A. (2022). Analisis Pengaruh Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode 2010-2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3301. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6501>